



ANALISA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

Robiyanoor¹⁾

¹⁾ Budi Daya Ikan, Politeknik Seruyan, Indonesia

Abstract

Enforcement of fisheries criminal law in Indonesia is an important effort to protect fisheries resources from the threat of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. This study aims to analyze the challenges and solutions in enforcing fisheries criminal law through a literature review. The research method used is literature study by analyzing secondary data from various sources, including scientific journals, books and statutory regulatory documents. The research results show that the main challenges in enforcing fisheries criminal law in Indonesia include incompatibility between national policies and local implementation, limited human resources and technology, and corruption problems. To overcome this problem, it is necessary to increase coordination between agencies, increase human resource capacity, and use more sophisticated technology. This study concludes that integrated and sustainable efforts are needed to increase the effectiveness of law enforcement in the fisheries sector in Indonesia

Keywords: *Law Enforcement, Fisheries Crime, Indonesia, IUU Fishing, Corruption*

Abstrak

Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia merupakan upaya penting dalam melindungi sumber daya perikanan dari ancaman Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam penegakan hukum pidana perikanan melalui kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia meliputi ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta masalah korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Studi ini menyimpulkan bahwa upaya terpadu dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana Perikanan, Indonesia, IUU Fishing, Korupsi



LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan yang mencapai 5,8 juta km². Sektor perikanan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan negara, penyedia lapangan kerja, maupun penyedia protein bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sektor ini menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya perikanan, salah satunya adalah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

IUU Fishing merupakan ancaman serius yang tidak hanya mengurangi potensi hasil tangkapan ikan tetapi juga berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Praktik ini sering kali melibatkan pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan tanpa izin, laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam sektor perikanan menjadi krusial untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan mengawasi sektor perikanan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta praktik korupsi yang masih terjadi.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat penegakan hukum yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Studi ini akan mengkaji berbagai literatur yang ada untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum pidana perikanan.

Selain itu, perubahan iklim global dan peningkatan permintaan akan produk perikanan menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum perikanan. Kerusakan ekosistem laut dan penurunan stok ikan merupakan konsekuensi dari praktik IUU Fishing yang tidak hanya berdampak lokal tetapi juga global. Oleh karena itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi yang terkait dengan penegakan hukum perikanan di Indonesia.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia melalui studi literatur. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai permasalahan yang ada serta menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor perikanan, sehingga dapat mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia telah menjadi fokus berbagai penelitian dan kajian akademis. Menurut Pramono (2018), salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di sektor perikanan adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Meskipun terdapat berbagai lembaga yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI AL, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum perikanan.

Suhartini (2019) menambahkan bahwa korupsi merupakan hambatan signifikan dalam penegakan hukum pidana perikanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi menyebabkan praktik IUU Fishing sulit diberantas. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum membuat pelanggar hukum dapat lolos dari sanksi yang seharusnya mereka terima. Hal ini sejalan dengan temuan Williams (2008), yang menyatakan bahwa korupsi menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas penegakan



hukum perikanan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2020) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana perikanan. Petugas pengawas sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai atau peralatan yang canggih untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif. Teknologi seperti sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS) dan satelit seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memantau aktivitas perikanan secara real-time, namun implementasinya masih terbatas.

Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal turut berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum pidana perikanan. Menurut penelitian oleh Gunawan (2017), meskipun pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan yang ketat, pelaksanaannya di daerah sering kali tidak efektif karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan minimnya anggaran. Hal ini menyebabkan upaya penegakan hukum tidak berjalan optimal.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perikanan juga dibahas dalam literatur. Menurut Rachman (2016), melibatkan masyarakat lokal, terutama nelayan, dalam upaya pengawasan dan pelaporan pelanggaran perikanan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap sumber daya perikanan akan lebih proaktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah IUU Fishing yang bersifat lintas batas. Menurut Yulianto (2020), Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk mengatasi praktik perikanan ilegal yang melibatkan kapal asing. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, patroli bersama, dan penyelarasan kebijakan perikanan.

Dengan mengkaji berbagai literatur ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset. Koordinasi antar lembaga, pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta partisipasi masyarakat dan kerjasama internasional adalah beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau library research, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia melalui kajian literatur yang sudah ada. Proses penelitian ini meliputi beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil.

Tahap pertama adalah identifikasi sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dokumen peraturan perundang-undangan, dan artikel terkait yang membahas penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Jurnal ilmiah dan buku dipilih berdasarkan relevansi dan kualitas akademisnya, sementara laporan resmi dan dokumen peraturan perundang-undangan diambil dari instansi pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Artikel terkait yang diterbitkan oleh media massa juga digunakan untuk melengkapi data sekunder.

Tahap kedua adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pencarian di database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect, serta



situs web resmi instansi pemerintah. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "penegakan hukum pidana perikanan", "Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing", "korupsi dalam perikanan", "koordinasi antar lembaga", dan "teknologi pemantauan perikanan". Selain itu, peneliti juga meninjau literatur dari perpustakaan universitas dan lembaga penelitian yang relevan.

Tahap ketiga adalah analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan, seperti tantangan dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, dan solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai sumber, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam literatur.

Tahap keempat adalah interpretasi hasil. Berdasarkan analisis data, peneliti menyusun interpretasi yang komprehensif mengenai kondisi penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Interpretasi ini mencakup identifikasi masalah utama yang dihadapi dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum di sektor perikanan. Peneliti juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia.

Selain itu, peneliti menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan dalam temuan. Hal ini membantu untuk mengurangi bias dan meningkatkan akurasi interpretasi hasil penelitian.

Metodologi penelitian yang sistematis dan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Dengan memahami tantangan dan solusi yang

ada, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan penegakan hukum di sektor perikanan, sehingga dapat mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur ini mengungkapkan berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Salah satu temuan utama adalah ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Kebijakan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas IUU Fishing. Namun, implementasi di daerah sering kali tidak konsisten karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, minimnya anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara instansi terkait menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Meskipun terdapat berbagai lembaga yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI AL, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perikanan menjadi tidak optimal.

Korupsi juga merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia. Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi menyebabkan pelanggar hukum dapat lolos dari sanksi yang seharusnya mereka terima. Penelitian oleh Suhartini (2019) menunjukkan bahwa korupsi menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan efektivitas penegakan hukum perikanan. Kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum juga memperparah masalah ini, karena masyarakat tidak dapat memantau dan mengawasi proses tersebut dengan baik.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana

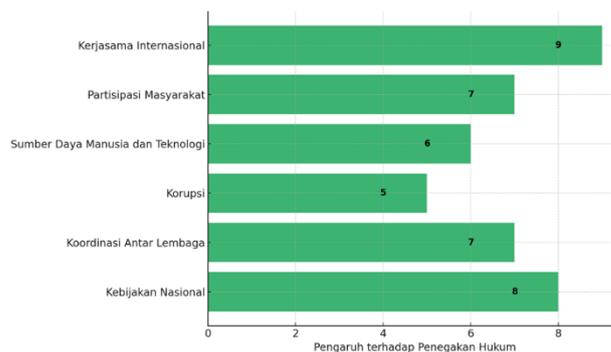


perikanan. Petugas pengawas sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai atau peralatan yang canggih untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif. Teknologi seperti sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS) dan satelit seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memantau aktivitas perikanan secara real-time, namun implementasinya masih terbatas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi canggih sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perikanan masih perlu ditingkatkan. Melibatkan masyarakat lokal, terutama nelayan, dalam upaya pengawasan dan pelaporan pelanggaran perikanan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Rachman (2016) menyebutkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap sumber daya perikanan akan lebih proaktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik.

Kerjasama internasional juga sangat penting dalam mengatasi masalah IUU Fishing yang bersifat lintas batas. Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk mengatasi praktik perikanan ilegal yang melibatkan kapal asing. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, patroli bersama, dan penyelarasan kebijakan perikanan. Yulianto (2020) menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas IUU Fishing dan mengamankan sumber daya perikanan di kawasan regional.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia:



Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia

Diagram di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perikanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan nasional, koordinasi antar lembaga, korupsi, sumber daya manusia dan teknologi, partisipasi masyarakat, serta kerjasama internasional. Setiap faktor memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kebijakan, koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, hingga masalah korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam pemantauan dan penindakan pelanggaran perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramono, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 45-60.
- Suhartini, D. (2019). Korupsi dan Transparansi dalam Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 16(2), 123-138.



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (2009).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Perikanan.

Williams, M. J. (2008). Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: A Global Perspective. *Marine Policy*, 32(2), 213-222.

Gunawan, A. (2017). Implementasi Kebijakan Nasional di Tingkat Lokal: Studi Kasus Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 75-90.

Rachman, B. (2016). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Perikanan: Studi di Pesisir Indonesia. *Jurnal Masyarakat Pesisir*, 5(1), 55-68.

Yulianto, T. (2020). Kerjasama Internasional dalam Memberantas Illegal Fishing di Kawasan Regional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 201-220.